

Pengelolaan Akuntansi Rumah Sakit Dan Dampaknya Terhadap Perhitungan Pajak Final Pada Jasa Kesehatan (Literature Review)

Jesica Riyanti Lase¹, Deli Fatresia Tarihoran², Depi Kristina Sagala³, Ester Gabriela Herawati Lumban Tobing⁴, Selly Nurjaya Telaumbanua⁵, Deasy Arisandy Aruan⁶
Department of Accounting, Universitas Prima Indonesia, jescicalase@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received Date: 02/01/2025

Accepted Date: 10/01/2025

Published Date: 31/01/2025

Keywords:

Akuntansi

Pajak

Kesehatan

ABSTRACT

This research aims to determine whether the preparation of financial reports, specifically in the fixed assets section, conducted by the accountants of XXX company (operating in the healthcare sector) has been prepared by the regulations stated in PSAK No. 16. The data for this research were obtained using a qualitative case study method with data collection techniques including data requests through observation, interviews, and documentation. The expected outcome of the data analysis is to conclude the evaluation of the application of PSAK No. 16 in the adjustment and treatment of fixed assets within a company.

Corresponding Author:

Jesica Riyanti Lase
Universitas Prima Indonesia
jescicalase@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan akuntansi di rumah sakit merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin efisiensi operasional serta akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dalam era pelayanan publik yang semakin menuntut transparansi dan efektivitas, rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam aspek medis, tetapi juga dalam tata kelola keuangan yang profesional dan sesuai dengan regulasi. Salah satu elemen utama dalam pengelolaan ini adalah penerapan sistem informasi akuntansi yang mampu menyediakan data akurat dan relevan, serta meningkatkan pengendalian internal, terutama dalam aspek yang sangat krusial seperti pengendalian persediaan obat. Obat-obatan sebagai bagian dari aset lancar rumah sakit memiliki nilai signifikan, sehingga kesalahan dalam pencatatan maupun pengendaliannya dapat berdampak pada efisiensi layanan dan kondisi keuangan secara keseluruhan.

Saat ini sudah banyak rumah sakit daerah di Indonesia telah mengadopsi sistem keuangan dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perubahan status ini memberikan keleluasaan kepada rumah sakit dalam mengelola anggaran dan sumber daya yang dimilikinya tanpa kehilangan prinsip akuntabilitas. Namun, fleksibilitas tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan sistem informasi akuntansi dan pengelolaan aset yang memadai. Masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti pengklasifikasian aset tetap yang tidak sesuai dengan PSAK No. 16, aset yang tidak tercatat atau sudah tidak digunakan tetapi masih muncul dalam laporan keuangan, serta ketidakefisienan dalam pengelolaan persediaan. Selain itu, pelaksanaan kewajiban perpajakan juga menjadi tantangan tersendiri. Kompleksitas perhitungan pajak, terutama terkait pajak final atas jasa kesehatan, masih sering menimbulkan

kebingungan dan risiko ketidakpatuhan di kalangan pengelola keuangan rumah sakit. Menurut (Supratiwi, 2023), menyebutkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak..

Tentu pengembangan sistem pengelolaan akuntansi ini memiliki peran yang sangat dibutuhkan, tidak hanya dalam mendukung proses operasional rumah sakit, tetapi juga untuk mengakomodasi ketentuan perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku. Dalam konteks transformasi layanan kesehatan, terutama dengan adanya program pembagian kluster Puskesmas oleh Kementerian Kesehatan, pengelolaan yang efisien dan akuntabel menjadi fondasi penting dalam memperbaiki kualitas layanan primer. Dengan kata lain, sistem informasi akuntansi yang kuat tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong perbaikan layanan kesehatan secara menyeluruh. Maka dari itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dalam rumah sakit berstatus BLUD dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan obat, aset tetap, serta memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Dari beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian (Maharani, 2023) “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23 Dan 29 Pada Uu No. 36 Tahun 2008 Di Rumah Sakit Aisyiah Pariaman” yang membahas tentang perhitungan setiap tarif pajak yang berlaku pada rumah sakit, selanjutnya penelitian (Ramly, 2020) “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Rumah Sakit Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango) membahas tentang pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kewajaran laporan keuangan, dan penelitian (Ningsih & Hafni, 2021), “Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit X Di Klaten-Jawa Tengah” membahas tentang rumah sakit melaksanakan kewajibannya atas pajak penghasilan 21. Sebagian besar penelitian fokus pada aspek sistem informasi akuntansi, penerapan standar akuntansi, serta pengendalian internal di rumah sakit. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji hubungan langsung antara pengelolaan akuntansi rumah sakit dengan perhitungan pajak final pada jasa kesehatan. Disinilah letak kebaharuan dari penelitian ini yaitu mengkaji tentang spesifikasi hubungan langsung antara pengelolaan akuntansi rumah sakit dengan perhitungan pajak final dengan tujuan mengukur kepatuhan rumah sakit terhadap pajak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, muncul pertanyaan:

1. bagaimana efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengendalian persediaan obat di rumah sakit berstatus BLUD?
2. apa pengaruh pengelolaan akuntansi terhadap efisiensi keuangan dan kepatuhan perpajakan rumah sakit?
3. apakah pengelolaan aset tetap di rumah sakit telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 16, serta bagaimana perbaikannya dapat dilakukan?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi landasan dalam merumuskan arah penelitian yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga solutif.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan informasi akuntansi dalam pengendalian persediaan obat di rumah sakit berstatus BLUD serta pengaruh-pengaruh pengelolaan akuntansi terhadap efisiensi keuangan dan kepatuhan perpajakan rumah sakit. Selain itu juga, untuk mengetahui apakah pengelolaan aset tetap rumah sakit sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 16 serta perhitungan pajak final terhadap kepatuhan instansi dalam membayar pajak.

2. TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

a. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini menjadikan SAK sebagai acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan publik termasuk perusahaan jasa instalasi dan konstruksi. Undang-undang tersebut juga mengharuskan semua emiten atau perusahaan publik untuk melaporkan laporan keuangannya secara periodik sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diatur

oleh SAK. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk meningkatkan transparansi serta perlindungan investor dalam pasar modal.

b. Pengelolaan Aset Tetap

Aset tetap di rumah sakit mencakup tanah, bangunan, peralatan medis, mesin, dan kendaraan yang digunakan secara berulang dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Pengelolaan aset tetap meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penyusutan, hingga penghapusan aset, yang bertujuan menjamin keamanan, efisiensi, dan akuntabilitas. Dalam pengelolaannya, aset tetap diakui berdasarkan harga perolehan yang mencakup seluruh biaya untuk memperoleh dan menyiapkan aset tersebut, serta diukur sesuai standar akuntansi seperti PSAK No. 16 dan SAP No. 07. Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus sesuai masa manfaat aset, memengaruhi nilai tercatat dan beban penyusutan dalam laporan keuangan. Pengendalian internal yang baik, seperti penomoran aset, pencatatan lengkap, pemeriksaan rutin, dan kebijakan penghapusan, sangat diperlukan, meskipun beberapa rumah sakit masih menghadapi kendala seperti ketiadaan asuransi aset dan kurang jelasnya pemisahan antara pengeluaran investasi dan biaya operasional. Pengelolaan yang optimal juga mendorong pemanfaatan aset secara efisien untuk meningkatkan kinerja operasional rumah sakit.

c. Kepatuhan Terhadap Pajak

Audit kepatuhan pajak tangguhan di Rumah Sakit “WQS” (Unair, 2024) menunjukkan penerapan prinsip akuntansi yang tepat serta pelaporan pajak yang transparan dan akurat. Rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah, memiliki kewajiban pajak seperti PPh dan PPN, meskipun BLUD dikecualikan dari PPh Badan. Tantangan utama mencakup kompleksitas regulasi, beban administrasi, serta kurangnya pemahaman perpajakan. Penggunaan jasa konsultan pajak menjadi solusi efektif. Rumah sakit swasta wajib menyetor PPh Badan dan melaporkan PPN, sementara rumah sakit pemerintah berperan sebagai pemungut PPN. Kepatuhan terhadap pajak juga mencakup pajak daerah seperti PKB dan PBB. Pemerintah melalui KPP Kotabumi turut melakukan uji kepatuhan untuk memastikan kewajiban perpajakan dijalankan dengan baik.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dapat mengetahui dan memahami tentang aturan yang berdasarkan undang-undang dan manfaat dari perpajakan”. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan akan sadar akan tanggung jawab dan mengerti kenapa harus membayar pajak. (Sari et al., 2020) menyimpulkan bahwa “jumlah wajib pajak akan semakin meningkat dengan pemahaman pentingnya pajak yang akan menjadi sumber realisasi penerimaan pajak, sosialisasi perpajakan yang dilakukan untuk memberitahu wajib pajak pentingnya realisasi penerimaan pajak”.

Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang baik akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga realisasi penerimaan pajak akan meningkat, kondisi ini hanya akan tercapai jika wajib pajak paham dan mengerti pentingnya peranan wajib pajak dalam pembangunan negara. Semakin baik pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan memiliki efek positif pada realisasi penerimaan pajak karena wajib pajak tersebut secara sukarela dan sadar untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. (Sari et al., 2020), Berdasarkan Theory of Planned Behavior yaitu Normatif Belief, motivasi dari kegiatan sosialisasi pajak dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga apabila KPP Pratama Kepanjen melakukan sosialisasi pajak, maka akan terbentuk suatu tekanan sosial bagi calon wajib pajak untuk memperoleh NPWP dan menjalankan peraturan perpajakan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis penelitian

Menurut (Dantes, 2021), "hipotesis merupakan praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh dengan melalui penelitian". Penelitian ini didasarkan pada tiga hipotesis utama. Pertama, penerapan sistem informasi akuntansi yang efektif diyakini dapat meningkatkan pengendalian persediaan obat di rumah sakit berstatus BLUD, khususnya dalam akurasi pencatatan dan efisiensi distribusi. Kedua, pengelolaan akuntansi yang baik diperkirakan berpengaruh positif terhadap efisiensi keuangan dan kepatuhan perpajakan rumah sakit, terutama dalam hal transparansi dan pelaporan yang sesuai regulasi. Ketiga, pengelolaan aset tetap di rumah sakit diasumsikan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 16, namun dapat ditingkatkan melalui penguatan pengendalian internal dan pelatihan teknis. Ketiga hipotesis ini menjadi dasar penelitian yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga solutif dalam upaya peningkatan tata kelola rumah sakit.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terhadap tingkat kepatuhan pajak di rumah sakit. Menurut (Mulyana, 2020), "penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah." Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji fenomena yang bersifat kompleks, seperti proses implementasi, pandangan para pelaku, serta tantangan yang dihadapi rumah sakit dalam memenuhi kewajiban akuntansi dan perpajakannya. Penelitian ini bersifat sekunder, memanfaatkan data yang telah tersedia sebelumnya seperti artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mengkaji pola, kendala, serta solusi yang berkaitan dengan penerapan SAK dan implikasinya terhadap kepatuhan pajak di rumah sakit.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara penerapan SAK dan kepatuhan pajak, serta menjadi contoh yang bermanfaat bagi rumah sakit dan perusahaan lainnya dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya di sektor pelayanan kesehatan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa rumah sakit, ditemukan bahwa pengelolaan akuntansi rumah sakit umumnya mengikuti standar akuntansi keuangan (SAK) dan Pedoman Akuntansi Rumah Sakit (PARS). Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi rumah sakit dalam pencatatan keuangan, yaitu:

- Kurangnya SDM yang Kompeten: Banyak rumah sakit, terutama rumah sakit kecil dan menengah, masih mengalami keterbatasan dalam tenaga akuntansi yang memahami regulasi perpajakan secara mendalam.
- Penggunaan Sistem Akuntansi yang Berbeda: Tidak semua rumah sakit menggunakan sistem akuntansi yang terintegrasi dengan sistem perpajakan, sehingga menyulitkan perhitungan pajak final secara otomatis.
- Pencatatan Pendapatan dan Biaya yang Tidak Konsisten: Beberapa rumah sakit mencatat pendapatan jasa kesehatan dan biaya operasional dengan metode yang berbeda, yang dapat memengaruhi perhitungan pajak final.

Pasal 16 Ayat (2) sampai (7) yang menjelaskan tentang cara mengelola aset medis dan non-medis yang dimiliki oleh rumah sakit. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- Peralatan yang Wajib Dikalibrasi secara Berkala : Pada Pasal 16 Ayat (2) disebutkan bahwa setiap aset medis yang dimiliki oleh rumah sakit harus melalui proses kalibrasi secara berkala. Prosesnya pun tidak dapat dilakukan sembarangan, karena harus diuji langsung oleh Badan Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi lain yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap aset RS.
- Peralatan yang Menggunakan Sinar Pengion yang sesuai Peraturan : Selain kalibrasi berkala, Pasal 16 Ayat (3) menyebutkan bahwa aset RS yang menggunakan sinar pengion juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, aset tersebut harus diawasi oleh lembaga yang berwenang dan juga memiliki kompetensi dalam peralatan medis tersebut.
- Dilakukan oleh Petugas Berpengalaman : Ketentuan pengelolaan aset RS lainnya yang harus Anda perhatikan adalah adanya petugas yang memiliki kompetensi dalam menggunakan dan juga merawat aset medis dan non-medis yang Anda miliki, yang tercantum pada Pasal 16 Ayat (3). Oleh karena itu, pastikan agar sumber daya manusia yang Anda pekerjakan memiliki kompetensi di bidangnya.
- Dokumentasi dan Evaluasi Berkala : Perlu Anda ketahui, Pasal 16 Ayat (4) menyebutkan bahwa pada setiap proses pemeliharaan aset RS harus disertai pula dengan dokumentasi yang jelas, sehingga dapat dipertanggung jawabkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Selain itu, bahan dokumentasi tersebut juga dapat dijadikan bahan untuk evaluasi yang wajib dilakukan secara berkesinambungan.
- Pengujian dan Kalibrasi sesuai Standar Keamanan : Ketentuan terakhir mengenai pengelolaan aset RS terdapat pada Pasal 16 Ayat (7), yang menyebutkan bahwa setiap pengujian dan/atau kalibrasi yang berhubungan dengan standar keamanan dari peralatan medis dan non-medis harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pastikan agar staf di rumah sakit benar-benar paham tentang pengelolaan aset yang tepat.

Menurut (Kemenkeu, 2020) dampak Penerapan Pajak Final pada Jasa Kesehatan

1. Tingkat Kepatuhan Pajak

Meskipun pajak final dirancang untuk menyederhanakan kewajiban perpajakan, rumah sakit yang belum memiliki sistem akuntansi yang memadai dapat mengalami kendala dalam pelaporan. Kurangnya dokumentasi yang akurat dan keterbatasan sumber daya manusia dalam akuntansi menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan di beberapa fasilitas layanan kesehatan.

2. Risiko Kesalahan dalam Perhitungan

Perhitungan pajak final tetap bergantung pada keakuratan pencatatan pendapatan bruto. Kesalahan dalam pencatatan, seperti tidak memasukkan pendapatan dari jasa tambahan atau salah klasifikasi transaksi, dapat menyebabkan kelebihan bayar atau kekurangan bayar yang berisiko sanksi administrasi dari otoritas pajak.

3. Dampak terhadap Kondisi Keuangan Rumah Sakit

Bagi rumah sakit swasta, pajak final dianggap cukup membebani karena harus dibayarkan meskipun rumah sakit mengalami kerugian. Hal ini disebabkan pajak dihitung atas penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya operasional. Kondisi ini menimbulkan tekanan terhadap likuiditas, khususnya di tengah tingginya biaya operasional dan ketergantungan pada pembayaran dari pihak ketiga seperti BPJS dan asuransi.

4. Kebutuhan Reformasi dan Evaluasi

Beberapa pihak menyarankan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pajak final di sektor kesehatan. Opsi seperti pengenaan pajak berdasarkan penghasilan neto dapat menjadi solusi yang lebih adil dan proporsional, tanpa mengabaikan kebutuhan negara akan penerimaan pajak.

Beberapa jenis pajak yang relevan untuk rumah sakit:

1. Pajak Penghasilan (PPh):

- PPh Badan: Dikenakan atas penghasilan yang diperoleh rumah sakit sebagai badan usaha.
- PPh Pasal 21: Dipungut atas penghasilan yang diterima oleh karyawan rumah sakit, seperti dokter, perawat, dan staf administrasi.
- PPh Pasal 23: Diterapkan pada pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pihak ketiga kepada rumah sakit, seperti tenaga kesehatan eksternal atau konsultan.

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):

- Dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki atau digunakan oleh rumah sakit.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

- Secara umum, jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenakan PPN. Namun, penjualan obat kepada pasien rawat jalan dapat menjadi objek PPN.

Pengelolaan akuntansi yang baik di rumah sakit sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan tersebut. Sistem akuntansi yang terstruktur membantu dalam pencatatan transaksi secara akurat, penghitungan pajak yang tepat, dan pelaporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak akan berdampak pada peningkatan pengetahuan wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan akuntansi yang baik memiliki dampak yang signifikan terhadap perhitungan pajak final di rumah sakit. Dengan pengelolaan akuntansi yang tepat, rumah sakit dapat memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan tercatat dengan akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga memudahkan perhitungan pajak yang tepat dan menghindari potensi kesalahan yang dapat merugikan. Oleh karena itu, menurut (Silalahi et al., 2021), menjelaskan bahwa kebijakan PPK-BLUD di RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai ini perlu sosialisasi yang memadai kepada seluruh kelompok kepentingan yang terkait dan berkepentingan dengan RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai. Setelah penerapan kebijakan akan menunjukkan suatu perubahan yang sebelumnya proses pengelolaan anggaran, keuangan, dan pelaporan yang selama ini murni harus berdasarkan peraturan keuangan dengan mekanisme APBD. Namun dengan penerapan PPK-BLUD, seluruh pendapatan yang peroleh RSUD Djoelham dapat langsung dikelola dan dipergunakan untuk kebutuhan dan keperluan RSUD. Langkah-langkah tersebut tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit secara keseluruhan. Hal ini akan memberikan keuntungan jangka panjang baik dari sisi finansial maupun reputasi rumah sakit, serta mendukung keberlanjutan operasional rumah sakit itu sendiri.

6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

- Peningkatan Kompetensi SDM Akuntansi: Rumah sakit perlu meningkatkan pelatihan bagi staf akuntansi agar lebih memahami regulasi pajak dan standar akuntansi yang berlaku.
- Implementasi Sistem Akuntansi Terintegrasi: Penggunaan software akuntansi yang dapat secara otomatis menghitung pajak final dapat membantu meningkatkan akurasi laporan keuangan rumah sakit.
- Audit Internal Secara Berkala: Melakukan audit internal secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak dan mencegah potensi kesalahan dalam pencatatan keuangan.

7. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, sehingga data yang diperlukan dapat terkumpul dengan baik.

8. REFERENSI

- Aviat. (2021). *Apa Saja Ketentuan Pengelolaan Aset RS?*
- B, F. (2019). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Ibu Dan Anak Sitti Khadijah III Di Makasar.*
- Dantes. (2021). Pengertian Hipotesis Menurut Para Ahli, Fungsi, Ciri, dan Manfaatnya. *Kompas.Com.*
- DDTCNews, R. (2023). *Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Jasa Dokter Praktik di RS atau Klinik.*
- Kemenkeu. (2020). *Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2020.*
https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/ter/file/1640354845_laporan_belanja_perpajakan_2020_ebook.pdf
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Transformasi Kesehatan Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sehat dan Unggul.*
- Kolantung, J. A. ., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2021). Evaluasi Penerapan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Pada PT JOBROINDO MAKMUR. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3).
- Maharani, I. (2023). ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 23 DAN 29 PADA UU NO. 36 TAHUN 2008 DI RUMAH SAKIT 'AISYIAH PARIAMAN. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).
- Mulyadi. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi untuk Pengendalian Internal.* Salemba Empat.
- Mulyana, D. (2020). *Metodologi Penelitian Kulitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya.* Remaja Rosdakarya.
- Niedar, A., Suryawati, C., Hardiawan, D., Vadrea, J., Panjaitan, N. A., Widodo, P., Harto, P., & Adawiyah, R. Al. (2022). *MANAJEMEN KEUANGAN DAN AKUNTANSI DALAM EKONOMI KESEHATAN.*
- Ningsih, N. N., & Hafni, D. A. (2021). ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA RUMAH SAKIT X DI KLATEN-JAWA TENGAH. *Nasional*, 1(2).
- Panggabean, N.S., Octavia, Y., Ani, P., & N. (2023). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Kinerja Rumah Sakit Umum di Medan. *JAFTA: Journal Maranatha*, 5(2).
- Prianthara, I. B. T. (2020). *Sistem Akuntansi Rumah sakit (Pertama).* Indomedia Pustaka.
- Ramly, R. Y. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Rumah Sakit Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan. *AkMen*, 17.
- Rusdianto, E., & Oktapiani, R. (n.d.). PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN JASA INSTALASI DAN KONTRUKSI DI CICURUG. *Jurnal Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).*
- Sari, H. A. Y., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 4(2).
- Silalahi, B. A., Sihombing, M., & Isnaini. (2021). Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. RM. Djoelham Binjai. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1) 2021: 1-13, 3(1). <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.518>
- Supratiwi, A. (2023). *PENGARUH MODERNISASI SISTEM PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI.*
- Unair, V. (2024). *Audit Kepatuhan Pajak Tangguhan di Rumah Sakit "WQS."*

Yuliani, R., & Harjanti, D. (2022). *Penerapan Sistem BLUD Pada Rumah Sakit: Analisis Efisiensi Keuangan dan Akuntabilitas*. Alfabeta.